



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dana alokasi khusus fisik bidang perlindungan perempuan dan anak harus dikelola berdasarkan prinsip keterpaduan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b. bahwa untuk melaksanakan penggunaan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang perlindungan perempuan dan anak, perlu membangun sinergisitas antarkementerian/lembaga terkait melalui tim koordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik Bidang PPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran DAK Fisik Bidang PPA melalui perumusan kegiatan, penyusunan pedoman umum, dan penyusunan petunjuk teknis;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang PPA;
- c. mengoordinasikan pelaporan DAK Fisik Bidang PPA; dan
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Anak Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-
047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG PPA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
1.	Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Pengarah	Nasional
2.	Patimasang Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan, Kemen PPPA	Pengarah	Nasional
3.	Destri Handayani, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
4.	Raden Rara Rita Erawati, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/ Bappenas)	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA	Nasional
5.	Fakih Usman, Inspektur, Kemen PPPA	Ketua Bidang Pengawasan	Nasional
6.	Muhaziron Sulistyowibowo, Kepala Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Ketua Bidang Penyediaan Data	Nasional
7.	Prijadi Santoso, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
8.	Dian Ekawati, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
9.	Susanti, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
10.	Dwi Jalu Atmanto, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
11.	Ratna Oeni Cholifa, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
12.	Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
13.	Sylvianti Angraini, Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelaksanaan	Nasional
14.	Dwi Budi Prasetyo, Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Perencanaan	Nasional
15.	Tria Rosalina Budi Rahayu, Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	Nasional
16.	Yogi Catuma Perdana, Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Petunjuk Teknis	Nasional
17.	R. A. Affandi Rahadian, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Penganggaran	Nasional
18.	Winda Febria Windi, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	Nasional
19.	Indah Lukitasari, Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
20.	Rahmat Deswanto, Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
21.	Wahyu Hadmaji Indra Pratama, Analisis Kepegawaian Ahli Muda, pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kemen PPPA	Anggota	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
22.	Yeyep Mulyana, Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
23.	Nazabiya, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
24.	Dewi Sahara, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
25.	Robiatul Adawiyah, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
26.	Enoh Suparno, Pengolah Data dan Informasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
27.	Marlinah, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
28.	Indra Rahmadi, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
29.	Desi Retnowati, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
30.	Nendiana Apriani, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
31.	Yuli Rosa Rahmayanti, Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Nasional
32.	Yosi Diani Tresna, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota	Nasional
33.	Qurrota Ayun, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas	Anggota	Nasional
34.	Ervan Arumansyah, Koordinator Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota	Nasional
35.	Sri Utami, Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Nasional
36.	Randy Saputra, Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Nasional
37.	Rati Handayani, Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas	Anggota	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
38.	Anggraini Dwi Hartanti, Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas	Anggota	Nasional
39.	Muhammad Zul Fauzi Sinapoy, Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas	Anggota	Nasional
40.	Marsella Dwi Putri, Staf pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota	Nasional

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI